

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abu Daud Busroh dan H. Abu Bakar Busroh, 1983, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Asyhadie, Zaeni, 2008, *Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuahan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dunn, Wiliam N, 2012, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Husni, Lalu, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenda Media Group.
- Kertonegoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Mutiara.
- Lubis, M Solly, 2012, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Manullang, Sedjun H, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzali, Amri, 2012, *Antropologi Dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Martosoeuwigno, Sri Soemantri, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: CV. Rajawali.

- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta.
- Pujiastuti, Endah, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang.
- Raharjo, Satjipto, 2002, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rudi Hendra Pakpahan dan Nam Sihombing, 2012, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Indonesia.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universtas Sebelas Maret.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Shalia Indonesia.
- Soepomo, Imam, 1982, *Pengantar Ilmu Perburuhan*, Penerbit Djambatan.
- Sulaiman, Abdullah, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M, 2001, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, Eko, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafindo.
- Wijayanti, Asri, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Yuliana Yuli W dkk, 2018, *Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)*.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Yang Telah Dicitak Ulang)
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Program Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714)
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715)
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716)
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076)

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu tertentu.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pengelompokan Upah.

C. Website

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#:~:text=Hak%20adalah%20kuasa%20untuk%20menerima,dapat%20dituntut%20secara%20paksa%20olehnya> pada 4 Agustus 2023.

Hasbullah Thabrany, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional: Sebuah Policy Paper dalam Analisis Kesesuaian Tujuan dan Struktur BPJS diakses melalui <http://staff.ui.ac.id/internal/140163956/material/BPJSNasionalatauBPJSD.pdf> pada 14 Juni 2023.

Pengertian Kebijakan, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> diakses pada tanggal 1 Juli 2023.

Pengertian Perlindungan, diakses melalui <https://kbbi.web.id/perlindungan.html> diakses pada 1 Juli 2023